

Relevansi Kebijakan Internasional: Mendeskripsikan Peran UNESCO, OECD, dan UNICEF

Ma'ruf Sholihin¹, Nadya Cindy Audina², Irfan Fauzi³

^{1,2,3}STAI "UISU" Pematangsiantar, Indonesia

Email: marufsholihin657@gmail.com¹, audicind@gmail.com², irfan17fauzi17@gmail.com³

ABSTRAK

Dinamika global yang semakin kompleks menuntut negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan perkembangan kebijakan internasional, mengingat integrasi ekonomi, isu keamanan transnasional, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi global berimplikasi signifikan terhadap perumusan kebijakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi atau peran UNESCO, OECD, dan UNICEF dalam relevansi kebijakan internasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis jurnal dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNESCO berperan dalam pengembangan standar pendidikan dan kebudayaan, OECD menyediakan instrumen evaluasi dan rekomendasi tata kelola melalui pendekatan berbasis data, dan UNICEF yang berfokus pada perlindungan anak dan pembangunan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan internasional yang dihasilkan oleh UNESCO, OECD, dan UNICEF memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk arah kebijakan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan manusia.

Kata Kunci: Kebijakan Internasional, UNESCO, OECD, UNICEF, Kualitas Pendidikan.

ABSTRACT

Increasingly complex global dynamics require countries to adapt domestic policies to international policy developments, considering that economic integration, transnational security issues, climate change, and global technological developments have significant implications for national policy formulation. This study aims to describe the contributions or roles of UNESCO, OECD, and UNICEF in the relevance of international policy. The method used is a literature study by analyzing journals and scientific articles. The results of the study indicate that UNESCO plays a role in developing educational and cultural standards, the OECD provides evaluation instruments and governance recommendations through a data-based approach, and UNICEF focuses on child protection and social development. The conclusion of this study is that international policies produced by UNESCO, OECD, and UNICEF have strong relevance in shaping the direction of national policy, particularly in improving the quality of education and human welfare.

Keywords: International Policy, UNESCO, OECD, UNICEF, Quality of Education.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, organisasi multilateral memegang peran strategis dalam membentuk arah kebijakan global, khususnya pada sektor pendidikan, pembangunan sosial, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Kompleksitas tantangan global mulai dari ketimpangan akses pendidikan, perubahan ekonomi berbasis pengetahuan, hingga perlindungan hak anak mendorong negara-negara untuk bergantung pada mekanisme kerja sama internasional yang terstruktur dan berlandaskan norma universal. Dalam konteks ini, UNESCO, OECD, dan UNICEF menjadi aktor kunci yang tidak hanya menghasilkan kerangka kebijakan, tetapi juga menyediakan standar, data komparatif, serta program advokasi yang memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat nasional.

UNESCO berperan sebagai lembaga normatif yang menempatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendorong harmonisasi kebijakan melalui pendekatan berbasis hak dan perdamaian. Sementara itu, OECD berkontribusi melalui produksi pengetahuan berbasis evidensi dan indikator kinerja antar negara, yang menjadi rujukan utama dalam reformasi kebijakan pendidikan dan ekonomi. Adapun UNICEF memiliki mandat khusus dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan standar internasional dalam hal kesejahteraan, kesehatan serta pemerataan layanan pendidikan.

Melalui peran yang berbeda namun saling melengkapi, ketiga organisasi tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan kebijakan publik di berbagai negara. Relevansi peran mereka semakin mencuat ketika pemerintahan nasional dihadapkan pada tuntutan global yang menuntut kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. Oleh karena itu, memahami kontribusi UNESCO, OECD, dan UNICEF menjadi kunci untuk menelaah bagaimana kebijakan internasional diartikulasikan, diadopsi, dan diimplementasikan dalam konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, menelaah, dan membandingkan berbagai sumber pustaka seperti jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang dikaji.

Referensi yang diambil kemudian dilanjut dengan analisis, perbandingan serta diskusi untuk memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan materi. Setelah menelusuri pengetahuan yang ada pada artikel dan jurnal, peneliti menuangkan hasil pemahaman dari sumber yang diperoleh ke dalam topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran UNESCO dalam Kebijakan Internasional

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) adalah badan khusus yang didedikasikan untuk memperkuat kemanusiaan kita bersama melalui promosi pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi. UNESCO didirikan di bawah naungan PBB pada tahun 1945. Adapun beberapa peran UNESCO yang relevan pada kebijakan internasional sebagai berikut:

1. UNESCO Berperan dalam Melestarikan Warisan Budaya

UNESCO berperan penting dalam melestarikan warisan budaya melalui penyusunan norma internasional, pemberian status perlindungan, serta fasilitasi kerja sama antar negara. Melalui berbagai konvensi dan program pelestarian, UNESCO mendorong negara anggota untuk menjaga keberlanjutan situs budaya, tradisi, maupun pengetahuan lokal sebagai bagian dari identitas kolektif umat manusia. Peran ini tidak hanya terbatas pada penetapan daftar warisan budaya, tetapi juga menyangkut upaya penguatan kapasitas komunitas lokal, penyediaan pendampingan teknis, dan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi warisan tersebut. Dengan demikian, UNESCO bertindak sebagai mediator global yang memastikan bahwa nilai sejarah, simbolisme budaya, dan praktik tradisional tetap terjaga di tengah dinamika perubahan sosial dan modernisasi.

Dalam hal ini terdapat studi kasus pelestarian warisan budaya oleh UNESCO, yaitu:

- a. Perlindungan warisan budaya dunia Angkor Wat di Kamboja: Bersama UNESCO, pemerintah Kamboja membentuk sebuah kerja sama dalam skala yang cukup besar untuk perkembangan berkelanjutan Angkor Wat yaitu *Heritage Management Framework*. Proyek kerja sama ini dilakukan bersama oleh UNESCO, pemerintah Kamboja dan Australia untuk mendukung perlindungan Angkor Wat dalam menghadapi berbagai ancaman yang terjadi sekarang maupun masa mendatang. UNESCO berkontribusi cukup besar dalam proyek tersebut dan memiliki peran yang signifikan terhadap perlindungan Angkor Wat sebagai warisan budaya dunia. Salah satu peran yang dilakukan adalah peran rehabilitasi. Peran ini bertujuan pada

perawatan lebih lanjut terhadap situs yang melibatkan seperti perbaikan maupun penambahan untuk mendukung dan melindungi nilai-nilai dari warisan budaya dunia.

Alasan UNESCO melestarikan warisan budaya Angkor Wat, disebabkan memiliki nilai universal yang luar biasa dengan kriteria (i, ii, iii, dan iv).

- 1) Kriteria (i): Kompleks Angkor mewakili seluruh jajaran seni Khmer dari abad ke-9 hingga 14, dan mencakup sejumlah mahakarya seni;
 - 2) Kriteria (ii): Pengaruh seni Khmer yang berkembang di Angkor sangat besar di sebagian besar Asia Tenggara dan memainkan peran mendasar dalam evolusinya yang khas.
 - 3) Kriteria (iii): Kekaisaran Khmer pada abad ke-9 hingga 14 mencakup sebagian besar Asia Tenggara dan memainkan peran formatif dalam perkembangan politik dan budaya wilayah tersebut. Satu-satunya yang tersisa dari peradaban tersebut adalah warisan budayanya yang kaya berupa bangunan-bangunan keagamaan dari batu bata dan batu.
 - 4) Kriteria (iv): Arsitektur Khmer sebagian besar berevolusi dari arsitektur anak benua India, yang kemudian menjadi jelas berbeda seiring dengan perkembangan karakteristik khususnya sendiri, beberapa berkembang secara independen dan yang lainnya diperoleh dari tradisi budaya tetangga. Hasilnya adalah cakrawala artistik baru dalam seni dan arsitektur oriental.
- b. Pelestarian warisan material budaya dunia Candi Borobudur di Indonesia: UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) memiliki peran penting dalam mengakui dan melindungi warisan budaya di seluruh dunia. Indonesia memiliki berbagai warisan budaya yang tidak hanya penting secara nasional tetapi juga diakui di tingkat internasional oleh UNESCO sejak tahun 1991. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan dibangun pada abad ke-8 oleh Dinasti Syailendra. Dengan ribuan relief dan stupa yang menggambarkan ajaran Buddha, Borobudur bukan hanya sebuah situs arkeologi tetapi juga karya seni yang megah. Candi ini menarik wisatawan dari seluruh dunia dan menjadi simbol penting dalam sejarah dan budaya Indonesia.
- c. Pelestarian warisan non material budaya dunia Rambu Solo' di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan: Upacara Rambu Solo' diakui sebagai warisan budaya Tak Benda oleh UNESCO pada tahun 2017. Upacara ini adalah sebuah ritual pemakaman yang sangat kompleks dan kaya simbolisme yang dilakukan untuk menghormati orang yang telah meninggal. Ritual ini melibatkan serangkaian upacara yang melibatkan komunitas, termasuk pembantaian kerbau, tarian, dan perayaan yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat Toraja.

2. Peran UNESCO dalam Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan pilar paling fundamental bagi UNESCO. Lembaga ini sering menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pendidikan global, terutama karena pendekatannya menempatkan pendidikan sebagai hak dasar manusia. UNESCO mengembangkan berbagai perangkat normatif mulai dari konvensi, rekomendasi hingga pedoman monitoring yang membantu pemerintah memperbaiki sistem pendidikan mereka secara berkelanjutan.

Program seperti *Education for All* (EFA) dan *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4) mendorong negara anggota untuk mengutamakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh penduduk tanpa diskriminasi. Tidak hanya berhenti pada advokasi, UNESCO juga mengumpulkan data komparatif melalui *Global Education Monitoring Report*. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kemajuan negara dan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap konteks lokal.

Dalam praktiknya, UNESCO juga terlibat dalam pelatihan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang berpusat pada penguatan literasi dasar dan digital, serta menyediakan dukungan teknis pada negara yang mengalami krisis kemanusiaan. Dengan demikian, UNESCO berperan sebagai pemikir (*think tank*), fasilitator kebijakan, sekaligus mediator dalam mempromosikan pendidikan sebagai prasyarat pembangunan sosial yang inklusif.

Dalam hal sektor pendidikan, terdapat beberapa studi kasus aksi lapangan yang dilakukan pihak UNESCO, yaitu:

- a. Pihak UNESCO mengupayakan dalam menekan angka buta huruf di Sudan Selatan dalam rangka implementasi SDG. Tingginya angka buta huruf yang tidak berubah signifikan selama beberapa tahun mendorong berbagai aktor, termasuk UNESCO. Untuk berkontribusi mengatasi masalah tersebut, sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB, UNESCO memiliki peran strategis dalam membantu negara anggotanya mencapai pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas sekaligus membangun fondasi kokoh bagi sistem pendidikan Sudan Selatan agar dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. UNESCO tidak hanya berperan sebagai penasihat kebijakan, tetapi juga terlibat langsung dalam penyusunan dan implementasi program pendidikan yang mengurangi tingkat buta huruf, khususnya di kalangan kelompok marjinal. Data UNICEF menunjukkan bahwa 50% anak usia 5 tahun tidak mengikuti pendidikan pra-sekolah, 75% anak usia 6 tahun dan 59% anak usia 7 tahun tidak mendapatkan pendidikan formal, dengan sekitar 2,2 juta anak tidak bersekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti buruh anak, anak terlantar akibat konflik, nikah dini bagi perempuan, pasukan militer anak, dan anak-anak dengan disabilitas.

3. Peran UNESCO dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan

Di sektor ilmu pengetahuan, UNESCO mengupayakan penguatan kapasitas riset dan membangun ruang kolaborasi lintas negara. Inisiatif besar seperti *Man and the Biosphere Programme* (MAB) menunjukkan bagaimana UNESCO menempatkan sains sebagai alat untuk memahami hubungan manusia dengan ekosistemnya. Program ini menekankan pentingnya konservasi berbasis pengetahuan ilmiah, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Lembaga ini juga berperan penting dalam mempromosikan sains sebagai basis pengambilan keputusan publik. Melalui jaringan ilmiah internasional, UNESCO mendorong kemajuan riset di bidang hidrologi, perubahan iklim, dan teknologi ramah lingkungan. Salah satu kontribusi praktisnya adalah pembangunan pusat-pusat kategori, yaitu pusat riset yang berfungsi sebagai mitra teknis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di negara-negara berkembang.

B. Peran OECD dalam Kebijakan Internasional

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) adalah organisasi internasional yang berbasis di Paris, Prancis dan efektif berdiri pada tahun 1961. OECD memegang posisi strategis dalam pilar tata kelola global selaku forum dan *platform* multilateral, yang berperan membentuk agenda kebijakan ekonomi pembangunan melalui formulasi, standarisasi, serta diseminasi metodologi, analisis, dan praktik terbaik, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti perpajakan, perdagangan, pendidikan, lingkungan, tata kelola publik, dan pembangunan internasional. Adapun beberapa peran OECD yang relevan dalam kebijakan internasional, yaitu:

1. OECD Berperan dalam Reformasi Perpajakan Internasional

OECD memainkan peran sentral dalam penyusunan standar perpajakan internasional melalui proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Proyek BEPS bertujuan menutup celah hukum yang dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Kerangka BEPS, yang kini diadopsi lebih dari 135 negara, memperkuat transparansi sistem perpajakan dan meningkatkan integritas fiskal global. Peran OECD dalam agenda perpajakan global dianggap sebagai salah satu keberhasilan terbesar lembaga ini dalam memengaruhi kebijakan internasional secara konkret. Selain itu, OECD turut memimpin pembahasan mengenai *global minimum tax* sebesar 15% yang ditujukan untuk menciptakan level *playing field* antara negara dan perusahaan multinasional.

2. OECD Berperan Sebagai Forum Kerja Sama Ekonomi Antar Negara

OECD berperan sebagai forum kerja sama ekonomi antar negara yang menyediakan ruang dialog kebijakan untuk membangun standar ekonomi, fiskal, dan tata kelola publik yang dapat diterapkan lintas yurisdiksi. Sebagai organisasi yang berorientasi pada pembentukan norma, OECD menghimpun data komparatif, melakukan analisis berbasis evidensi, serta

menyelenggarakan proses *peer review* guna menilai efektivitas kebijakan yang diadopsi oleh negara anggota maupun mitra non anggota. Peran ini memungkinkan OECD menjadi kanal yang menjembatani perbedaan kapasitas institusional negara, sehingga mereka dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi dalam menghadapi tantangan global seperti integrasi pasar, transformasi digital, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial.

Kinerja OECD sebagai forum deliberatif tercermin dari kemampuannya menghasilkan pedoman yang bersifat *soft law*, seperti *OECD Guidelines for Multinational Enterprises and Principles of Corporate Governance*. Meskipun tidak mengikat secara hukum, dokumen tersebut digunakan secara luas oleh pemerintah dan sektor swasta karena menawarkan kerangka praktik terbaik yang teruji secara empiris.

3. Peran OECD dalam Relevansi Kebijakan Internasional Pada Bidang Pendidikan

OECD melalui PISA (*Programme for International Student Assessment*) telah berperan penting pada pendidikan global dengan mengevaluasi dan membandingkan keterampilan dan pengetahuan siswa dari berbagai negara di seluruh dunia dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Hasil PISA digunakan untuk memberikan wawasan tentang kinerja pendidikan di berbagai negara, memungkinkan perbandingan internasional, dan membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan mereka. PISA sendiri merupakan program evaluasi yang dilakukan setiap 3 tahun untuk mengukur kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains pada siswa berusia 15 tahun di seluruh negara peserta. Sebagai penyelenggara PISA, OECD bekerja sama dengan negara-negara peserta untuk mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyediakan laporan yang memberikan informasi tentang kinerja siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan di tingkat internasional.

C. Peran UNICEF dalam Kebijakan Internasional

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) adalah organisasi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak maupun wanita yang berada di negara-negara berkembang. UNICEF menyediakan perlindungan layanan kesehatan, vaksinasi, serta dukungan kepada anak-anak yang tinggal di daerah terdampak bencana ataupun daerah tertinggal di penjuru dunia. UNICEF didirikan di New York, Amerika Serikat. Kantor pusat UNICEF juga berlokasi di kota New York, Amerika Serikat.

Adapun beberapa peran UNICEF dalam relevansi kebijakan internasional, yaitu:

1. UNICEF Berperan Sebagai Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya-upaya perlindungan anak di seluruh dunia terutama di Indonesia, menuju pada perkembangan sistem komprehensif yang dapat mempromosikan dan memastikan perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam semua konteks. Upaya ini terdiri dari penguatan bukti yang dapat memantau peraturan dan kebijakan terkait anak-anak, perkembangan kapasitas untuk pihak-pihak kunci terkait kesejahteraan anak-anak, dan memberikan dukungan teknis yang inovatif dalam reformasi kebijakan dan berbagai program terkait anak-anak ke seluruh dunia.

UNICEF berpegang pada prinsip konvensi hak anak, khususnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Untuk memastikan kesejahteraan anak, UNICEF mendorong penguatan perlindungan sosial yang "sensitif terhadap anak", yaitu sistem bantuan sosial, peningkatan akses layanan, dan intervensi terhadap kerentanan anak dalam berbagai tahap kehidupannya.

2. UNICEF Berperan Sebagai Penyediaan Layanan Kesehatan dan Pendidikan Anak

UNICEF memusatkan perhatian pada kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi pembangunan manusia. Orientasi utama lembaga ini adalah memastikan bahwa anak, sejak masa kehamilan hingga usia remaja, memperoleh akses terhadap layanan yang aman, terjangkau, dan berkesinambungan. Dalam banyak kasus, UNICEF bekerja melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. Penyediaan bantuan langsung: Bantuan langsung diwujudkan melalui penyediaan imunisasi, Vitamin A, nutrisi tambahan, dan fasilitas sanitasi dasar pada wilayah-wilayah yang secara ekonomi dan geografis mengalami keterbatasan. Upaya ini sering kali menjadi langkah awal untuk mengurangi angkat kesakitan dan kematian anak.
- b. Penguatan sistem kesehatan nasional: Penguatan sistem kesehatan dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan, serta penyediaan alat dan sarana medis yang sesuai standar. UNICEF memfasilitasi integrasi layanan kesehatan primer dengan isu gizi, sanitasi, dan pendidikan keluarga.
- c. Pendampingan teknis berbasis bukti ilmiah: UNICEF menekankan pentingnya data ilmiah dalam menentukan prioritas kesehatan anak. Lembaga ini menginisiasi survei nasional, mendorong penggunaan data digital, serta memastikan bahwa intervensi kesehatan mengacu pada praktik berbasis bukti ilmiah.

Selain kesehatan, UNICEF menempatkan pendidikan sebagai pilar penting untuk membangun masa depan anak. Akses terhadap pendidikan yang inklusif, aman, dan berkualitas dipandang sebagai syarat mutlak untuk memperluas kemampuan anak dalam menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi. Peran UNICEF dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Lembaga ini mendorong penyediaan pendidikan dasar yang merata, terutama bagi kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas, anak di daerah terpencil, dan anak dari keluarga miskin. Melalui program *child friendly school* atau sekolah ramah anak, UNICEF membantu membangun lingkungan belajar yang aman, bebas kekerasan, serta mendukung perkembangan sosial emosional anak.
- b. UNICEF memberikan dukungan terhadap pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman, termasuk integrasi literasi dasar, literasi digital, dan pendidikan kesehatan reproduksi.
- c. UNICEF sering memfasilitasi penyediaan material pendidikan, seperti buku bacaan, modul pembelajaran darurat, dan sarana teknologi pembelajaran. Dalam masa krisis, misalnya bencana alam, pandemi, atau konflik peran ini menjadi krusial karena memastikan proses belajar tetap berlangsung melalui *learning continuity program*. Langkah ini terbukti menjaga tingkat partisipasi sekolah di banyak wilayah yang terdampak.

KESIMPULAN

Relevansi kebijakan internasional pada era global saat ini semakin ditentukan oleh kemampuan organisasi multilateral dalam menjembatani kepentingan berbagai negara. Dalam konteks tersebut, UNESCO, OECD, dan UNICEF memainkan peran yang berbeda namun saling melengkapi. UNESCO hadir untuk memperkuat fondasi sosial kultural melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pelestarian budaya. Sementara itu, OECD berupaya membangun tata kelola ekonomi yang lebih stabil dan transparan dengan mendorong standar kebijakan publik yang dapat diterapkan lintas negara. Di sisi lain, UNICEF menempatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas global, memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak mengabaikan kelompok paling rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendri Wijaya, dkk. 2015. *Peran UNESCO dalam Perlindungan Angkor Wat Sebagai Warisan Budaya Dunia Tahun 2009-2013*. Bali: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Tiffany Abigail, dkk, *Upaya UNESCO dalam Menekan Angka Buta Huruf di Sudan Selatan dalam Rangka Implementasi SDG*, Jurnal Internasional, Vol. 7, No. 2, Agustus 2025.
- OECD. 2023. *OECD: Economic Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing.
- Kumala Tesalonika Bahter, *Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 8, No. 2, April 2020.

UNICEF. 2021. *Education in South Sudan Briefing Note*.
<https://www.unicef.org/southsudan/documents/education-briefing-note>
<https://whc.unesco.org/en/list/668/>
<https://www.gramedia.com/literasi/warisan-budaya-indonesia-yang-diakui-unesco/>